

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of Government Regulation No. 46 Year 2013 on the increase in the number of taxpayer UMKM and receipt of Income Tax Article 4 paragraph (2). This type of research used in this study was a descriptive study. Data collection techniques used in this study is documentation techniques. The collected data was processed using descriptive analysis by comparing the number of UMKM registered taxpayer in KPP Pratama Bandung Tegallega before and after the enactment of Government Regulation Number 46 Year 2013, to determine the impact of Government Regulation No. 46 Year 2013 on the increase in the number of UMKM and comparing Taxpayers Tax receipts number of UMKM with a number of income tax revenue Article 4 Paragraph (2) and to determine the impact of Government Regulation No. 46 Year 2013 on income tax revenue Article 4 Paragraph (2). The results of this study indicate that the impact of Government Regulation No. 46 Year 2013 on the number of UMKM Taxpayers can not be explained if the taxpayer uses the data amount obtained from KPP Pratama Bandung Tegallega because the data is the data overall taxpayer listed on KPP Pratama Bandung Tegallega, by Therefore, researchers used data based on the amount of taxpayer SSP given by KPP Pratama Bandung Tegallega and the results showed an increase from July 2013 until March 2014 and in April decreased to July 2014. the impact of the implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013 of the income tax revenue Article 4 Paragraph (2) shows a fluctuating contribution of criteria is very less, less, to moderate.

Keywords: *Government Regulation Number 46 Year 2013, the amount of taxpayer UMKM, and Tax Receipts Article 4 Paragraph (2)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan analisis deskriptif dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM dan membandingkan jumlah penerimaan Pajak UMKM dengan jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap jumlah Wajib Pajak UMKM tidak dapat dijelaskan apabila menggunakan data jumlah Wajib Pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Tegallega Bandung karena data tersebut adalah data keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung, oleh karena itu peneliti menggunakan data jumlah Wajib Pajak berdasarkan SSP yang diberikan oleh KPP Pratama Tegallega Bandung dan hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan maret 2014 dan pada bulan april terjadi penurunan sampai dengan Juli 2014. Dampak penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) menunjukkan kontribusi yang fluktuatif dari kriteria sangat kurang, kurang, sampai dengan sedang.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Jumlah Wajib Pajak UMKM, dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak	8
2.1.4 Pajak Penghasilan	11
2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.1.4.2 Subjek Pajak Penghasilan	12

2.1.4.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan	13
2.1.4.4 Objek Pajak Penghasilan	13
2.1.4.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan	15
2.1.5 Wajib Pajak	17
2.1.5.1 Pengertian Wajib Pajak	17
2.1.5.2 Hak Wajib Pajak	18
2.1.5.3 Kewajiban Wajib Pajak	22
2.1.6 UMKM	25
2.1.6.1 Usaha Menengah	25
2.1.6.2 Usaha Kecil	26
2.1.6.3 Usaha Mikro	27
2.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	27
2.1.7.1 Maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	28
2.1.7.2 Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	28
2.1.7.3 Hasil yang Diharapkan	28
2.1.7.4 Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	28
2.1.7.5 Bukan Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	29
2.1.7.6 Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	29
2.1.7.7 Bukan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	29
2.1.7.8 Tarif Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	30

2.1.7.9	Penyetoran dan Pelaporan Subjek Pajak Peraturan	
	Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	30
2.1.8	Penelitian – Penelitian Terdahulu	31
2.2	Rerangka Pemikiran	33
BAB III	METODE PENELITIAN	34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Teknik Pengumpulan Data	34
3.3	Jenis dan Sumber Data	34
3.4	Teknik Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama	
	Bandung Tegallega.....	37
4.1.2	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM Berdasarkan	
	SSP yang Diterima KPP Pratama Bandung	
	Tegallega	39
4.1.3	Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46	
	Tahun 2013	41
4.2	Pembahasan	46
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	48
5.1	Simpulan	48
5.2	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Tegallega Bandung	37
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak UMKM Berdasarkan SSP yang diterima di KPP Pratama Tegallega Bandung	39
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	41
Tabel 4.4 Kontribusi PP 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2)	44

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	38
Grafik 4.2	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM Berdasarkan SSP	40
Grafik 4.3	Kontribusi PP 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2)	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Data Peningkatan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega	50
Data Jumlah SSP UMKM yang Diterima KPP Pratama Bandung Tegallega	50
Data Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Tegallega	51
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Tegallega	51
Sejarah KPP Pratama Bandung Tegallega	52
Visi dan Misi	56
Bagan Organisasi	57
Uraian Tugas Seksi Di KPP	58